

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pengangguran dan ketidakmampuan berwirausaha dengan berbagai variabel antiseden dan variabel ikutannya merupakan persoalan yang berdimensi majemuk. Apabila tidak mendapat perhatian, kebijakan (policy), penanganan yang cepat dan tepat akan menjadi masalah sosial yang sangat besar dan luas dampak negatifnya. Masalah pengangguran bukan saja persoalan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, melainkan juga merupakan persoalan sosial, sosiologi, atau pun yang berhubungan dengan kajian ekonomi. Persoalan pengangguran juga berhubungan dengan dimensi transedental dan kemanusiaan. Seseorang wajib berusaha memperjuangkan kehidupannya, seorang "bapak" harus mencari nafkah untuk keluarganya, dan dalam berusaha harus berkemauan keras (azam) dan jangan menyia-nyaiakan kesempatan. "Janganlah kamu mengatakan dalam sesuatu hal, bahwa aku akan mengerjakan itu besok, kecuali jika Allah menghendakinya" (QS. Al-Kahfi 23-24). Firman ini sudah turun sejak jaman dahulu, namun fadilahnya kurang berkembang dalam pergaulan umat Islam, justru terkenal dengan bahasa Inggris, "Don't wait till tomorrow, what you can do today". Jangan tunggu sampai esok, apa yang dapat engkau kerjakan hari ini. Dalam pekerjaan dituntut kemauan keras dan memang kemauan Manusia/bangsa yang berhasil adalah bangsa yang bekerja keras, tahan menderita tapi berjuang terus menerus memperbaiki nasibnya. Apabila telah ber-azam (kerja keras), maka bertaqwalah kepada Allah (QS. Ali Imran: 159). Ayat ini telah memberikan

tuntunan bahwa manusia harus bekerja. Bekerja adalah perintah Tuhan yang bernilai ibadah bila bekerja itu diniatkan sebagai cara untuk mencari ridhla Allah SWT, sehingga seandainya ada orang Islam yang mati karena bekerja berdasarkan tuntunan agama, maka ia mati di jalan Allah.

Dari sisi kemanusiaan, bekerja merupakan cara yang benar dan sarana paling terhormat untuk mendapatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan kebutuhan tingkat lanjutnya, serta untuk memper-tahankan hidup seorang manusia dan keluarganya. Tidak akan dipandang sebagai manusia yang sempurna, bahkan akan dianggap sebagai bukan manusia; bila seseorang hidup, mempertahankan hidup, makan minum berpakaian berumah dan lain-lain urusan kehidupannya bukan dari hasilnya bekerja. Harkat, martabat, dan derajat orang yang kehidupannya didapat dari bukan hasil bekerja, betapapun ia hidup berkecukupan, akan dipandang lebih rendah daripada orang yang bekerja kasar atau serabutan dalam mempertahankan hidupnya dari hari ke hari. Dengan demikian orang pengangguran tidak saja berarti tidak produktif secara ekonomis, cacat sosial secara sosiologis, belum matang atau masih bergantung secara psikologis, tetapi juga mendapat stigma sebagai orang yang tidak dapat menunaikan ajaran agama (*sunatullah*). Maka predikat pengangguran bagi seseorang merupakan cela, cacat, atau stigma negatif yang pasti akan dihindari oleh seseorang, dan menjadi persoalan bagi sistem sosialnya. Dalam tinjauan teori Sumber Daya Manusia, manusia pengangguran merupakan faktor produksi yang puso atau gagal panen karena ia tidak bisa menghasilkan atau mengembalikan investasi ekonomis yang tertanam pada dirinya yang berupa pendidikan,

kesehatan, waktu, biaya dan pengorbanan-pengorbanan ekonomis lainnya yang telah dicurahkan untuk menampilkan sosoknya yang sekarang (Cohn, 1979, dalam Priyono, 1982:11).

Masalah pengangguran merupakan persoalan potensial yang akan selalu hadir pada setiap situasi sosial bila variabel-variabel antiseden dan variabel sebab (causal) yang memungkinkan untuk itu muncul secara signifikan. Persoalan pengangguran akan tetap ada pada setiap komunitas, masyarakat, atau bangsa, dari yang paling sederhana tingkat perkembangannya sampai yang telah maju sekalipun, yang berbeda barangkali adalah pola pengangguran, kualitas atau tingkatan, dan jumlahnya. Sebagaimana yang terjadi pada masa krisis ekonomi, bahkan krisis multi- dimensi, yang dialami oleh bangsa Indonesia dekade terakhir ini sejak tahun 1997 telah menimbulkan gelombang pengangguran dengan pola, kuantitas, dan kualitas yang variatif dan besar. Pada masa sebelum krisis pun persoalan pengangguran sudah cukup merepotkan para pengambil kebijakan, apalagi yang terjadi pada masa krisis ini.

Dalam masa krisis ini telah terjadi akumulasi variabel causal dominan yang secara komulatif dan simultan menyebabkan melonjaknya angka pengangguran dan dampak sosial negatif lainnya. Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi 79 juta orang (pada tahun 1996 hanya 22 juta orang miskin), kurang lebih 5 juta orang adalah akibat kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) baru, dan 5 juta anak sekolah terancam putus sekolah (Herman Haeruman, 1999). Sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami penurunan secara drastis dari 9,21

% pada tahun 1996 turun menjadi 4,28% pada tahun 1997, dan lebih terpuruk lagi menjadi minus 14,14% pada tahun 1998, dengan tingkat inflasi pada periode tahun yang sama, yaitu tahun 1996 sebesar 6,54% tahun 1997 sebesar 9,94%, dan pada semester 1 Juli tahun 1998 menjadi 50,15% (Bappeda Jabar, 1999).

Sekelumit data lain dilaporkan oleh *Harian Pikiran Rakyat*, 14 April 1998, bahwa di akhir tahun 1998/1999 terdapat 13,4 juta pencari kerja, jumlah itu belum termasuk pekerja konstruksi yang terkena PHK. Kanwil Depnaker Jawa Barat menyatakan bahwa 2,3 juta angkatan kerja di Jawa Barat menganggur. Mereka terdiri dari angkatan kerja baru 1998 yang belum bekerja, sisa penganggur dari angkatan kerja 1997, dan pekerja yang di-PHK yang jumlahnya mencapai 70.000 orang (*Harian Pikiran Rakyat*, 8 September 1998).

Kondisi ekonomi nasional khususnya di Jawa Barat seperti di atas berdampak pada kemandegan aktivitas ekonomi yang disebabkan oleh turunnya produksi, terhentinya kegiatan sektor riil, meningkatnya jumlah pengangguran dari 1,11 juta orang pada tahun 1997 meningkat menjadi 1,71 juta orang pada tahun 1998. Kondisi ini diikuti pula dengan semakin bertambahnya jumlah keluarga miskin (Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I/Pra KS dan KS1), bila pada tahun 1996 jumlahnya sebesar 3,96 juta orang, menjadi 11,56 juta orang pada tahun 1998 (Bappeda Jabar, 1999). Dalam kaitan ini Din Syamsudin (1999) pernah menulis bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin yang lebih 300% ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat tidak mampu untuk membiayai kehidupannya. Sedangkan kemiskinan merupakan ancaman terhadap pembangunan yang sangat serius dan harus ditangani.

Dari sedikit gambaran itu dapat dimengerti betapa penting dan terkaitnya masalah pengangguran itu dengan masalah-masalah yang lain. Krisis ekonomi jelas telah menambah besarnya jumlah pengangguran itu, yang sebelumnya juga sudah cukup besar dan belum pernah terpecahkan secara tuntas. Yang lebih memprihatinkan, jumlah pengangguran terdidik, terutama sarjana, terus meningkat. Diperkirakan jumlah sarjana pencari kerja saat ini mencapai 125.000 orang. Jumlah itu akan terus bertambah lebih dari 113.000 orang setiap tahunnya. Dari angka pertumbuhan angkatan kerja sarjana hanya 30% - 40% yang terserap oleh pasar tenaga kerja (Handoko, 1995). Oman Hedipermana (1997) dengan mengutip data dari Menteri Tenaga Kerja RI menyatakan bahwa lulusan perguruan tinggi pada tahun 1994 sebanyak 217.180 orang; yang bekerja hanya 75.470 orang. Pada tahun 1995 lulusan perguruan tinggi mencapai 218.473, yang berhasil bekerja 80.120 orang. Dari data itu dapat diketahui bila lulusan perguruan tinggi (sarjana) yang terserap lapangan kerja hanya 34%-36% saja atau tingkat pengangguran berpendidikan sarjana mencapai 64%-66%. Ironisnya, menurut Tilaar (1997:181) dalam situasi jumlah tenaga kerja penganggur tinggi, termasuk lulusan perguruan tinggi, pada sisi lain ada lebih dari 60.000 orang tenaga kerja dari luar negeri memamasuki Indonesia, untuk itu dunia usaha mengeluarkan sekitar \$ 3 milyar setahun untuk menggajinya.

Kerisauan berbagai pihak tentang pengangguran di kalangan sarjana itu sangat beralasan karena di samping mereka telah mendapatkan bekal pendidikan yang lebih banyak dibanding tingkat pendidikan di bawahnya, juga atas alasan dengan meningkatnya jumlah pengangguran sarjana dikhawatirkan dapat memicu

gejolak sosial yang lebih besar. Dengan badai krisis yang melanda Indonesia dekade terakhir ini, persoalan pengangguran ini menjadi demikian serius untuk bisa segera dipecahkan. Apabila tenaga kerja berpendidikan tinggi dan menengah saja masih terperosok menjadi pengangguran, apalagi mereka yang tidak berpendidikan cukup/berpendidikan rendah, atau berpendidikan namun telah kadaluwarsa kemampuan yang dimilikinya dibanding kemajuan-kemajuan yang telah ada.

Pengangguran atau penganggur tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang telah memiliki keterampilan dan kelompok yang sama sekali tidak memiliki keterampilan. Adapun para penganggur yang telah berpendidikan, apalagi berpendidikan perguruan tinggi, tentulah termasuk kelompok penganggur yang telah cukup memiliki keterampilan. Persoalan belum pernah mendapat lapangan kerja dan menjadi pengangguran merupakan persoalan lain dan persoalan tersendiri yang perlu dipelajari dan ditangani lebih lanjut. Demikian juga penganggur yang disebabkan karena terkena PHK, pada dasarnya mereka adalah tenaga terampil karena telah pernah bekerja pada lapangan tertentu. Apabila setelah terkena PHK itu belum juga ia mendapatkan lapangan pekerjaan, itu juga persoalan tersendiri dan persoalan lain yang perlu dipelajari dan ditangani lebih lanjut. Sebagai sumber daya manusia yang telah memiliki potensi lebih dari yang lain, yaitu sebuah kepemilikan keterampilan tertentu, maka ia sebenarnya merupakan sosok sumber daya manusia yang potensial, permasalahan adalah bagaimana memanfaatkan dan menindaklanjuti potensi tersebut menjadi sumberdaya yang lebih berkualitas.

Dalam "Pengangguran dan Setengah Pengangguran di Perkotaan" yang ditulis Iwan Prasojo dalam Prisma No. 2 (1993:68) pada kesimpulannya berbunyi:

Kebijakan yang mengutamakan peningkatan kualitas pendidikan formal, tanpa diimbangi dukungan penyerapan tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan tinggi, berakibat membengkaknya pengangguran terdidik. Peningkatan pengangguran terdidik dapat menimbulkan kerawanan sosial yang tinggi. Lulusan perguruan tinggi yang tersingkir dapat menciptakan revolusi: teknisi dan alumni pendidikan menengah yang tidak terpakai dapat makin mempergawat kadar ketidakdamaian politik.

Dalam teori Sumber Daya manusia tampilnya sosok sumber daya manusia yang berkualitas merupakan tanggung jawab semua bidang, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Orang yang berpendidikan cukup dalam arti telah cukup belajar dan sehat jiwa-raganya merupakan potensi sumber daya manusia yang akan produktif. Khusus pada aspek pengembangan kemampuan, keterampilan, dan sikap adalah menjadi tanggung jawab sektor pendidikan, baik pendidikan jalur sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (PLS).

Masalah pengangguran dan kemiskinan bisa jadi masalah politik, bukan masalah pendidikan, namun dalam paradigma pendidikan liberal pendekatannya mendominasi segenap pemikiran tentang pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal seperti berbagai macam pelatihan. Akar dari pendidikan ini adalah liberalisme, suatu pandangan yang menekankan pada pengembangan kemampuan, melindungi hak dan kebebasan (freedom) serta mengidentifikasi problem dan upaya perubahan secara inskremental demi menjaga stabilitas jangka panjang, (M. Fakhri, 2001:20).

Para pengangguran atau penganggur terampil itu dalam pandangan PLS memerlukan reorientasi untuk melihat lagi kemampuan dan masalah-masalah yang dihadapi sehubungan dengan dunia kerja. Selanjutnya dengan reorientasi itu barangkali ada bagian kemampuan pada dirinya yang perlu dimutakhirkan sesuai dengan tuntutan perubahan keadaan. Pemutakhiran kemampuan inilah esensi dari *reccurent education* untuk meraih kembali peluang kerja baru yang masih tersedia atau menciptakan lapangan-lapangan kerja baru secara inovatif. Tuntutan pemutakhiran kemampuan ini pun merupakan aktualisasi dari konsep Belajar Seumur Hidup (*Life long Learning*). Coombs (1974) berpendapat bahwa pendidikan luar sekolah yang tepat seperti kursus dapat dijadikan sebagai alternatif selain pendidikan sekolah untuk memerangi kemiskinan. Salah satu cara mendapatkan pelajaran baru untuk memutakhirkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap itu adalah melalui program pelatihan atau training atau *institutional program* (Boyle, 1984).

Ada kaitan fungsional yang sangat erat antara pelatihan, penanggulangan kemiskinan, dan masalah pengangguran. Dalam upaya mengatasi krisis ekonomi Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program, dari yang bersifat penyelamatan (*rescue*) sampai yang bersifat pemulihan (*recovery*). Diantara program-program itu adalah yang disebut program Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), Program Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PKDMK), Proyek Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Peningkatan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Program Penanggulangan

Pengangguran Pekerja Terampil (P3T), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Prakarsa Khusus bagi Pengangguran Wanita/PKPP (*Special Initiative for Women Unemployment/ SIWU*), dan program-program lainnya.

Program-program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sumber daya manusia itu telah menghabiskan dana yang sangat besar. Beberapa yang datanya berhasil diketahui misalnya PKDMK dananya mencapai Rp. 598 miliar lebih, P3T dananya mencapai Rp. 399 miliar, P2KP untuk satu SWK (Satuan Wilayah Kerja) saja, dananya mencapai Rp. 95 miliar. Sementara P2KP ada 9 KMW (baru se-Jawa).

Meskipun telah demikian banyak program pengentasan kemiskinan atau program penanggulangan pengangguran telah diselenggarakan, namun hasilnya belum dapat dikatakan memuaskan. Satu hasil yang disepakati oleh sebagian komunitas pengamat masalah sosial adalah berbagai program tersebut telah berhasil meredam gejolak sosial dan gejolak politik yang mungkin bisa terjadi akibat krisis ekonomi. Adapun masalah pengangguran berpendidikan dan pengangguran pekerja terampil masih saja menjadi sisa persoalan yang belum terpecahkan secara tuntas.

Masih bertahannya sejumlah besar pengangguran terampil apakah itu yang diakibatkan oleh kasus PHK atau yang lain diduga disebabkan oleh belum berorientasinya pola pendidikan, sikap mental, dan orientasi nilai warga masyarakat terhadap jiwa kewirausahaan. Pendapat ini didasarkan pada pandangan Handoko (1995:11) bahwa pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh dunia pendidikan, baik formal maupun nonformal belum berorientasi untuk

menghasilkan anak didik yang mampu mengembangkan usaha sendiri, sehingga seolah-olah anak didik disiapkan untuk menjadi anak buah atau bawahan dari suatu usaha besar. Juga pendapat Tilaar (1993) yang menyatakan bahwa sistem pendidikan kita masih menekankan pada fungsinya sebagai pemasok tenaga kerja terdidik daripada sebagai penghasil tenaga penggerak pembangunan, sementara sektor negara dan swasta tidak mampu menyediakan lapangan kerja sebanyak yang diperlukan oleh lulusan pendidikan. Dugaan itu juga difandasi oleh pendapat Suparman Suma hamidjaja (1980:27-27) bahwa pola pendidikan yang berlaku dewasa ini cenderung berpola pendidikan Barat, sedangkan Barat merupakan bangsa-bangsa yang sudah maju. Sistem pendidikan Barat mempersiapkan manusia untuk ditempatkan dalam pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan itu diciptakan oleh lapisan industri dan perusahaan-perusahaan yang mampu menciptakan pekerjaan secara luas, sedangkan di Indonesia dunia industri belum mampu menciptakan pekerjaan secara luas sebagaimana di dunia Barat itu. Akibatnya dibiarkan saja tamatan-taman sekolah dan pendidikan lainnya tercekam oleh pola berpikir yang disebut Hamidjaja (1980) sebagai pola pikir "*bagaimana mencari pekerjaan, dan bukan menciptakan pekerjaan*".

Hal inilah yang kembali diingatkan oleh Sudjana (2000:301) bahwa dunia pendidikan termasuk PLS di Indonesia mendapat kritik tajam sehubungan dengan ketidakmantapannya dalam mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan tata kehidupan kesejagadan (baca: globalisasi). Pendidikan pada umumnya baru mampu menghasilkan lulusan pencari kerja atau buruh sebagai bagian dari masyarakat pekerja (*worker society*).

Dalam situasi krisis ekonomi yang berakibat pada kelesuan ekonomi, menciutnya peluang kerja, maraknya kasus PHK dan pengangguran, serta masalah sosial ikutannya, yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia dan/atau lulusan dunia pendidikan yang mampu menyiapkan tata kehidupan masyarakat yang menciptakan lapangan pekerjaan (*employe society*) yang memiliki kemampuan teknis. Kritik tajam itu perlu menjadi pemacu bagi komunitas dunia pendidikan untuk melihat kembali sistem sosial dan sistem kerjanya dan menemukan kelemahan-kelemahan yang dideritanya, melakukan rekonstruksi dan revitalisasi diri secara komprehensif bahkan bila perlu secara menyeluruh, dan selanjutnya segera menyusun kembali rencana aksi riil dan yang layak diterapkan, serta segera merealisasikannya secara taat azas dan konsisten.

Dalam menghadapi kebutuhan atau masalah pengangguran pekerja terampil, di mana setiap program pelatihan atau pun program aksi yang diselenggarakan belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan, segenap komunitas PLS perlu melihat dan melihat kembali terhadap program-program yang telah dan sedang berlangsung itu. Kegiatan melihat kembali (*review*) perlu dilakukan untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara objektif tentang sisi-sisi kekurangan dan juga keberhasilannya. Berdasarkan hasil tersebut selanjutnya disusun lagi program baru yang lebih baik, lebih efektif, lebih mudah, lebih murah (efisien), dan lebih kompetibel dengan kebutuhan-kebutuhan ke depan. Seandainya pada program-program pelatihan dan aksi sosial untuk penanggulangan kemiskinan dan/atau pengangguran (terampil) itu komunitas PLS, khususnya pemangku kajian PLS belum atau tidak dilibatkan dalam

mengembangkan desainnya, bukan menjadi alasan untuk terus berlepas tangan dan tanggung jawab akan dampak sosial negatif yang ditimbulkan. Menjadi kewajiban moral dan kewajiban profesi para pemangku kajian PLS untuk secara lantang dan konsisten mengajukan saran-saran, sumbangan pikiran normatif, tenaga maupun kemampuan lain yang dimiliki di bidang pendidikan dan pelatihan di jalur PLS agar sesuai dengan nilai-nilai, kaidah, norma, maupun visi dan misi PLS.

Berdasarkan berbagai latar belakang dan kepentingan yang terjabar di muka, penelitian ini dilakukan dalam rangka menemukan dan mengembangkan alternatif yang lebih baik mengenai model pelatihan bagi penganggur pekerja terampil agar mampu menjadi pewirausaha baru yang lebih unggul, dalam makna lebih efektif dan lebih sesuai dengan kaidah-kaidah normatif kependidikan khususnya kaidah PLS.

Di antara berbagai program pelatihan bagi penganggur itu, P3T merupakan program pelatihan bagi penganggur terampil yang secara khusus ditujukan untuk mengubah orientasi khalayak sasaran itu dari pencari kerja menjadi pewira usaha. Program P3T inilah yang dipilih sebagai kasus yang akan distudi secara mendalam untuk menemukenali kelemahan dan kelebihan program pelatihan bagi penganggur pekerja terampil menjadi pewirausaha baru atau pewirausaha yang lebih berkembang. Agar mendapatkan bahan perbandingan diteliti pula beberapa program sejenis yang relevan, salah satu diantaranya adalah program P2KP.

B. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian

Manual P3T menjelaskan bahwa visi dan misi adalah sebagai program jaring pengaman sosial dalam menanggulangi krisis ekonomi. Tetapi secara implisit terkandung pula nuansa pemberdayaan masyarakat. Ada dua jenis pola P3T, yaitu yang pertama disebut pola *Lembaga Ekonomi Produktif (LEP)* dan yang kedua disebut pola *Wira Usaha Baru (WUB)*. Dalam kaitan penelitian ini fokus penelitian akan diarahkan pada pola WUB. Kegiatan utama P3T pola WUB itu adalah berupa pelatihan yang dimaksudkan sebagai aktivitas *reccurent education*, dilanjutkan dengan program perintisan atau pengembangan usaha, dan pemberian hibah biaya hidup selama tiga bulan dan pemberian hibah modal kerja (Depnaker, 1998). Dengan bekal pelatihan, hibah biaya hidup selama tiga bulan, dan hibah modal kerja itulah diharapkan tumbuh wirausaha baru yang berasal dari orang yang berpredikat sebagai penganggur pekerja terampil.

Masalah pendidikan luar sekolah, pelatihan, pengangguran pekerja terampil, fasilitasi penumbuhan wirausaha baru, dan kewiraswastaan bisa mencakup permasalahan yang sangat luas dan kompleks. Itulah persoalannya, sehingga dalam studi ini *perlu dilakukan pemilihan masalah secara terfokus dan spesifik*. Di antara persoalan-persoalan itu terdapat hubungan fungsional yang sangat erat.

Sudjana (2000:130) menulis bahwa Pendidikan Luar Sekolah berorientasi pada *kewirausahaan*. Kewirausahaan menjadi salah satu alternatif untuk peningkatan daya saing masyarakat Indonesia dalam era globalisasi. Daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat interanasional pada saat ini masih sangat

rendah. Sudjana (2000:130) dengan mengutip laporan yang disajikan *The World Competitiveness Report* tahun 1996, menggambarkan rendahnya daya saing sumber daya manusia Indonesia. Dari segi kemampuan menembus pasar internasional, Indonesia berada pada urutan ke-37 dari 40 negara Asia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada urutan ke-45. Akibatnya, secara nasional daya saing ekonomi Indonesia juga menjadi sangat rendah. Lebih lanjut Sudjana (2000), mengatakan bahwa berdasarkan laporan *The World Economic Forum* menunjukkan bahwa daya saing ekonomi Indonesia pada tahun 1994-1997 masih rendah. Pada tahun 1994 Indonesia berada pada peringkat ke-31 dari 41 negara, tahun 1995 pada peringkat ke-33 dari 48 negara, dan tahun 1996 pada peringkat ke-41 dari 46 negara. Rendahnya daya saing sumber daya manusia Indonesia itu sebagian besar disebabkan oleh tingkat dan kualitas pendidikan yang dijalani tidak memadai. Pendidikan merupakan satu faktor dominan dalam mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, meskipun faktor kesehatan dan gizi masih juga merupakan faktor determinan yang signifikan pula.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 10 menyatakan bahwa "Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan". Lebih operasional lagi melalui PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah Bab II pasal 10 dinyatakan tentang tujuan pendidikan luar sekolah, yaitu "(1) melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya; (2)

membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan (3) memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah". Program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan/atau sikap supaya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan lingkungan strategis bersifat sebagai *reccurent education*, dapat dipandang sebagai upaya pelaksanaan UUSPN dan PP No. 73/1991 tersebut, khususnya klausul tentang tujuan PLS.

Dengan demikian pelatihan kewirausahaan yang dikemas melalui Program P3T dan P2KP merupakan kegiatan PLS yang sangat penting. Kepentingan P3T sebagai sebuah pelatihan itu menjadi semakin signifikan bila diletakkan dalam kerangka praktis bagi pengembangan masyarakat, khususnya menanggulangi pengangguran, korban PHK agar tumbuh menjadi manusia yang produktif (kembali) dan memiliki wawasan kewirausahaan dan selanjutnya dapat mengembangkan diri menjadi wirausahawan walaupun dalam skala yang kecil. Dalam skala nasional dan internasional, kewiraswastaan atau kewirausahaan menjadi salah satu alternatif terbaik untuk peningkatan daya saing masyarakat Indonesia di tingkat internasional.

Menurut Sudjana (2000:132), PLS dapat membina dan mengem-bangkan kewirausahaan melalui dua pendekatan. *Pertama*, mengintegrasikan materi pembelajaran kewirausahaan ke dalam kurikulum/program dalam satuan jenis pendidikan luar sekolah. Kewirausahaan dapat dijadikan materi pokok atau

tambahan pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis seperti pelatihan, penyuluhan, dan pusat magang. Demikian pula kewirausahaan dapat diintegrasikan ke dalam jenis pendidikan umum keagamaan, kedinasan, jabatan kerja, dan kejuruan/keterampilan. *Kedua*, kewirausahaan menjadi program pendidikan tersendiri. Program ini dapat dilakukan melalui pendidikan *penyadaran diri (conscientization)* bagi masyarakat, dan dapat pula dalam bentuk satuan pendidikan khusus seperti kelompok belajar, kursus pelatihan, dan magang tentang kewirausahaan. Demikian pula bahwa kewirausahaan sebagai program mandiri ini dapat dilakukan melalui pendidikan kader, pendidikan massa, dan/atau pendidikan perluasan. Dalam konteks inilah pelatihan dalam P3T akan dikaji dan digunakan acuan merekonstruksi model yang lebih baik bagi penumbuhan kewirausahaan bagi para penganggur pekerja terampil.

Disertasi Azahari (1998) dari University Of Pittsburgh memperoleh kesimpulan bahwa pada umumnya pelatihan secara signifikan mengakibatkan peningkatan rasa percaya diri pada para peserta dalam pengembangan bisnis keluarga, selain membantu kerja sama dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu hasil studi juga menunjukkan bahwa program pelatihan membantu peserta dalam mengembangkan hubungan positif antara anggota keluarga. Temuan lainnya mengenai semakin tinggi tingkat pendidikan para peserta, semakin mudah memahami informasi materi pelatihan, rentang usia 30-49 tahun sebagai paling produktif dalam mencapai pendapatan tertinggi.

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, beberapa permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini ditunjukkan pada tujuan akhir penelitian yaitu mendapatkan alternatif yang lebih baik tentang model pelatihan bagi penganggur terampil agar tumbuh sebagai wirausahawan baru. Untuk mencapai tujuan akhir itu dilakukan serangkaian studi yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: (1) studi kasus tentang program P3T dalam dimensi normatif maupun faktual melalui fokus (sampling) alumni pelatihan yang dinilai berhasil yang dilanjutkan dengan analisis evaluasi dan refleksi untuk melihat kelebihan dan kelemahan program P3T itu, pada tahap ini peneliti juga meneliti pelatihan-pelatihan (pola empirik) yang diselenggarakan dalam P2KP; (2) laboratorium studi (laboratory research) yaitu kajian pustaka, diskusi, dan konsultasi dengan nara sumber. Studi ini sebagai studi pengembangan untuk merumuskan gambaran konseptual model pelatihan normatif bagi penganggur pekerja terampil agar menjadi wirausahawan baru; (3) studi verifikasi dan validasi model konseptual dengan pendapat seperti melalui seminar dan lokakarya; dan (4) uji empirik pengembangan model melalui eksperimen, untuk kemudian direvisi dan penghalusan.

C. Perumusan Masalah

Atas dasar uraian dari fenomena atau identifikasi permasalahan di atas bahwa lahir dan tumbuh kembangnya wirausaha baru, dapat dibangun melalui pelatihan. Salah satu asumsinya adalah bahwa lahir dan tumbuh kembangnya pengusaha baru (pengusaha kecil) karena pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan kewirausahaan. Berkaitan dengan pelatihan untuk menumbuhkan penganggur pekerja terampil menjadi pewirausaha baru, pada

aspek desain pelatihannya perlu mendapat perhatian secara serius. Pelatihan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, apalagi secara *anomic* (perbuatan atau aktivitas fisik tanpa arah dan tanpa tujuan yang jelas).

Dengan kata lain persoalan mendasar yang ingin dikaji dan diwujudkan dalam penelitian ini, adalah bagaimana model generik desain pelatihan bagi penganggur pekerja terampil agar tumbuh menjadi pewirausaha baru skala kecil.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka masalah-masalah penelitian yang ingin dipecahkan dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana anatomi desain model Pelatihan Program Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (selanjutnya disebut *Pelatihan P3T*), yang meliputi: rasional atau latar belakang, visi dan misinya, asumsi, maksud dan tujuan, sasaran, khalayak sasaran, strategi pembelajaran, materi latihan, metode pelatihan, nara sumber atau instruktur, sarana dan prasarana, alat dan media pelatihan, iklim sosial pelatihan, evaluasi program dan evaluasi hasil belajar, serta tindak lanjut pasca pelatihan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja (Kanwil Depnaker Jabar)?
2. Bagaimana pelaksanaan *Pelatihan P2KP* di satua wilayah kerja III, Jabar yang meliputi sepintas visi, misi proyek dan fokusnya mengenai pelatihannya; bagaimana tercapainya maksud, dan tujuan, sasaran yang ditetapkan; bagaimanakah pola perekrutan, jumlah dan kualitas khalayak sasarannya, meliputi hal apa saja materi pelatihannya; bagaimanakah strategi pembelajaran yang diterapkan, apa metode pelatihan yang digunakan, siapakah nara sumber atau instruktur yang ditugaskan, apakah cukup

Mislin?

in kta
Sudi
3/1

memadai dan sesuaikah sarana dan prasarana, alat dan media pelatihan yang digunakan, kondusif dan mendukung keberhasilan pelatihankah; bagaimanakah evaluasi program dan evaluasi hasil belajar dalam pelatihan yang diterapkan, adakah dan bagaimanakah tindak lanjut pasca pelatihan yang diselenggarakan?

3. Apa dan bagaimanakah kelemahan atau kelebihan/keunggulan Pelatihan P3T, dan pelatihan pada P2KP, ditinjau dari aspek pelaksanaannya, pada hal-hal apakah harus ditambahkan atau dikurangi, atau dimodifikasi?
4. Bagaimana merekonstruksi model pelatihan dari dua model, menjadi salah satu *model alternatif pelatihan kewirausahaan* bagi pengangguran terampil atau masyarakat miskin yang ingin berusaha. Hal ini dengan mencobakan model pelatihan kewirausahaan kepada sejumlah peserta, memberi kesempatan menyusun proposal usaha, dan mengajukan modal usaha. Dalam hal ini diterapkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat, yang direkrut secara khusus, walau dalam cakupan program P2KP. Model inilah yang dimaksud dengan Model Perintisan dan Penumbuhkembangan Wirausaha Baru".
5. Model evaluasi seperti apa yang sesuai dalam pelatihan kewirausahaan; apakah dites "citra diri peserta", apakah dites disiplin dirinya, apakah dites kreativitasnya, apakah dites bagaimana menghadapi suatu resiko, apakah dites kepercayaan dirinya. Hal ini penting, karena berkaitan dengan "kepribadian wirausaha".

Konvensional

Konvensional

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana secara implisit telah dikemukakan pada latar belakang masalah di muka, tujuan studi ini adalah menemukan atau mengembangkan model alternatif pelatihan bagi penganggur terampil dan peminat usaha dari warga miskin di perkotaan, agar tumbuh menjadi pewirausaha baru skala kecil. Untuk mencapai tujuan tersebut dipilih program pelatihan P3T sebagai contoh kasus yang dianalisis dan beberapa program pelatihan sejenis (yaitu P2KP) sebagai thesis untuk dianalisis dan direfleksi, dan dilakukan kajian konsep-konsep dan teori tentang pelatihan, pendampingan, magang, belajar swarah dan konsep-konsep kewirausahaan bagi calon pengusaha kecil yang ada. Selanjutnya dilakukan rekonstruksi agar tersusun suatu konsep model alternatif pelatihan bagi pengangguran tersebut. Model konseptual yang dihasilkan melalui serangkaian langkah pengembangan model itu selanjutnya divalidasi melalui penilaian seorang ahli dan praktisi. Demikianlah tujuan umum dan langkah-langkah studi yang dilakukan untuk mencapai tujuan umum studi ini.

Dengan demikian secara linier (meskipun kegiatan riellynya ada yang dilakukan secara simultan) dan merujuk pada masalah penelitian yang ditetapkan, tujuan penelitian bagian perbagian adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan anatomi desain model Pelatihan P3T yang meliputi: rasional atau latar belakang, visi dan misinya, asumsi, maksud dan tujuan, sasaran, khalayak sasaran, strategi pembelajaran, materi latihan, metode pelatihan, nara sumber atau instruktur, sarana dan prasarana, alat dan media pelatihan, iklim sosial pelatihan, evaluasi program dan evaluasi hasil belajar, serta

1-2-3
a/patung ... no 3 Soje²¹

tindak lanjut pasca pelatihan yang diselenggarakan oleh Kanwil Depnaker Jabar.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan Pelatihan P2KP di satua wilayah kerja III Jabar yang meliputi aktualisasi visi, misi yang digunakan, ketercapaian maksud, dan tujuan, sasaran yang ditetapkan; pola perekrutan, jumlah dan kualitas khalayak sasarnya, cakupan materi pelatihan, strategi pembelajaran yang diterapkan, metode pelatihan yang digunakan, nara sumber atau instruktur yang ditugaskan dan pola perekrutannya, kecukupan dan kesesuaian sarana dan prasarana latihan, alat dan media pelatihan yang digunakan, kondusivitas dan evaluasi program dan evaluasi hasil pelatihan yang diterapkan, tindak lanjut pasca pelatihan yang diselenggarakan.
3. Mendeskripsikan alternatif model pelatihan bagi pengangguran atau masyarakat miskin yang ingin berusaha yang relatif lebih mampu membentuk diri sebagai wirausaha baru skala kecil dan menengah, yang meliputi deskripsi konseptual tentang rasional atau latar belakang, visi dan misi, asumsi, maksud dan tujuan, sasaran, khalayak sasaran, materi pelatihan, strategi pembelajaran, metode latihan, nara sumber atau instruktur, sarana dan prasarana, alat dan media pelatihan, iklim sosial pelatihan, evaluasi program dan evaluasi hasil belajar, serta tindak lanjut pasca pelatihan yang perlu dilakukan, terutama pola belajar swaarah yang dilakukan para alumni pelatihan dan pola pendampingan yang perlu dilakukan.
4. Mendeskripsikan hasil uji coba penerapan pelatihan kewirausahaan, penilaian ahli dan praktisi terkait tentang kelayakan dan validitas model alternatif

577

pelatihan bagi penganggur terampil yang dikembangkan studi, terutama yang berkaitan dengan kelayakan substansi idea-idea model, kelengkapan komponen model, kelayakan lapangan, dan perkiraan efektivitasnya dalam menumbuhkan kemampuan kewirausahaan peserta latihan.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, di antaranya:

1. Bagi penulis sendiri demi pengembangan wawasan, pengalaman lapangan dan akhirnya untuk dapat menyusun disertasi.
2. Bagi pengembangan ilmu; diharapkan dari penelitian disertasi ini akan menjadi salah satu upaya pengembangan wawasan keilmuan dalam hal ini ilmu Ke-PLS-an, terutama wawasan tentang pelatihan kewirausahaan.
3. Bagi penerapan ilmu pengetahuan; penelitian ini di satu sisi bermakna pengembangan ilmu pengetahuan di sisi lain penelitian ini sebagai aplikasi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini tentang ke-PLS-an dan pelatihan kewirausahaan untuk kepentingan praktis dalam kehidupan masyarakat.
4. Bagi lembaga pemerintah, atau instansi yang berkepentingan dengan pelatihan, untuk memahami tentang model pelatihan kewirausahaan bagi calon pengusaha kecil.
5. Bagi masyarakat umum, akan menjadikan wawasan atau uraian yang relatif lengkap. Dalam hal ini tentang belajar kewirausahaan bagi calon pengusaha

2 point!

akhirnya disertasi
parade

aplikasi

kecil. Lebih jauh diharapkan dapat menjadi sumbangan walaupun kecil bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

F. Batasan Istilah

Agar terjadi kejelasan arah penelitian dan kesamaan konsep, perlu ada batasan yang jelas terhadap istilah-istilah yang terkait dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang perlu diberikan batasannya adalah: pelatihan, model, desain pelatihan, penganggur, pengangguran, pengangguran terampil, pengangguran pekerja terampil, kewirausahaan, wirausaha, usaha skala kecil, dan P3T serta P2KP. Berikut adalah deskripsi yang diupayakan memberikan batasan terhadap istilah-istilah tersebut.

1. **Pelatihan**, atau yang biasa disebut juga sebagai training adalah keseluruhan konsep dan kegiatan pendidikan, pembelajaran, bimbingan, fasilitasi, dan/atau pendampingan agar peserta latihan memperoleh peningkatan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap tertentu sebagaimana yang dibutuhkan. Tom W. Goad, (1982:9) memberikan batasan "*Training, is a human-resource development activity, is a closed-loop process. It includes numerous functions and can be accomplished a variety of ways*".
2. **Model**, adalah deskripsi konseptual atas benda, prosedur, situasi, atau pikiran/idea. Model disebut juga pola. Model atau pola merupakan terjemahan dari istilah "*pattern*". Dalam kamus yang ditulis Salim (1989:1194) tertulis, "*Pattern* adalah sebuah model, rencana dan sebagainya yang harus diikuti secara persis". Jadi model di sini adalah suatu pola yang dapat dijadikan contoh, dijadikan acuan, atau rujukan untuk secara benar-

benar diterapkan di lapangan, dalam hal ini adalah kegiatan pelatihan bagi pengangguran terampil.

3. **Penganggur**, adalah predikat yang diberikan kepada orang yang sedang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja untuk kebutuhan hidupnya. Dalam membatasi istilah ini, Iwan Prasojo (1993:57) mengemukakan bahwa:

Menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu tertentu dan atau sedang mencari pekerjaan termasuk yang sedang menunggu pemanggilan terhadap lamaran bekerja yang diajukan, atau sedang tidak mencari pekerjaan karena beranggapan tidak ada kesempatan yang tidak tersedia bagainya walaupun ia sanggup dan mau bekerja. Ada juga istilah tidak bekerja penuh (*underemployment*) adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu.

Betapapun seseorang hidup berkecukupan bila pemenuhan kebutuhan hidupnya itu tidak didapat dari hasilnya bekerja disebut sebagai penganggur. Dalam bahasa Inggris penganggur disebut sebagai *unemployment*. Sedangkan orang yang belum pernah bekerja padahal sudah berada pada usia produktif atau orang yang telah dalam jangka relatif lama tidak lagi bekerja disebut sebagai "*pengangguran*". Bila seseorang telah memiliki pekerjaan tertentu, namun pada jangka waktu tertentu sedang tidak bekerja, tidak ada *order* atau pesanan pekerjaan atau sedang tidak punya jabatan, maka ia disebut *nganggur* atau *non job* atau *jobless*, betapapun secara riil ia mengerjakan sesuatu dan produktif.

4. **Kewirausahaan**, Ramond W. Y Kao (1995) menyebut *kewirausahaan sebagai suatu proses*. Yakni proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi), tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi

masyarakat. Istilah '*kewirausahaan*' merupakan terjemahan dari bahasa Inggris '*entre-preneurship*' yang termasuk kata sifat (adjective) yang menunjukkan sifat '*wirausaha*'. '*Wirausaha*' atau '*entrepreneur*' (Inggris), '*unternehmer*' (Jerman), '*ondernemer*' (Belanda), '*entrepeneur*' (Perancis) yang artinya "*to under take*" (melakukan), konsep-konsep ini termasuk kata benda orang (personal noun) yang menunjukkan orang yang mempunyai sifat wiraswasta (orangnya). Istilah '*entrepreneur*' pertama kali dilontarkan oleh Cantillon (Perancis) pada tahun 1755, dan istilah tersebut merupakan suatu pengertian yang berkembang secara perlahan (*evolusioner*) karena perkembangan yang menyertainya, dan selalu ada penambahan segi-segi baru dari fungsi wiraswasta (Daud Yusuf, 1981: 75).

5. ***Wirausaha***, menunjukkan orangnya atau wirausahawan. Padanan kata wirausaha adalah *wirasawasta* atau juga *entrepreneur*. Sementara pengertian *wiraswasta* secara etimologis berasal dari kata *wira* berarti *utama, gagah, luhur, berani, teladan* atau *pejuang*. *Swa* berarti *sendiri*. *Sta* berarti *berdiri*. *Swasta* berarti *berdiri di atas kaki sendiri*, atau dengan kata lain berdiri di atas kemampuan sendiri. Dengan demikian, "*wiraswasta/ wirausaha* berarti pejuang yang gagah, luhur, berani, dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan/kewiraswastaan; keberanian mengambil risiko, keutamaan, kreativitas dan keteladanan dalam usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri", (Salim S. dan Asfahani, 1996).

Steinhoff (1993:37) mengemukakan ada empat ciri kepribadian wirausaha, yaitu (1) memiliki kepercayaan diri yang tinggi (*self confidence*) terhadap kerja keras, kerja mandiri dan memahami bahwa resiko yang diambil adalah bagian dari keberhasilan; (2) memiliki kemampuan mengorganisasi dan membuat tujuan, dan berorientasi serta bertanggung jawab terhadap hasil yang dilakukan apakah itu baik atau buruk, (3) memiliki kreativitas dan mencari jalan untuk merealisasi-kannya melalui kewirausahaan, (4) suka pada tantangan, dan menemukan diri dengan merealisasikan ide-idenya.

Menjadi wirausahawan berarti memiliki kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang-peluang, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dari peluang-peluang itu (Meredith, 1996). Para wirausahawan adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan, dan bermotivasi mengambil resiko dalam mencapai tujuannya.

Sebagaimana juga dikemukakan Meredith (1996), bahwa ciri-ciri dan sifat-sifat profil dari wirausaha, di antaranya (1) percaya diri, meliputi: keyakinan, ketidaktergantungan, individualitas dan optimisme; (2) berorientasikan tugas dan hasil, meliputi: kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energitic, dan inisiatif; (3) pengambil resiko, meliputi: kemampuan mengambil resiko, suka pada tantangan; (4) kepemimpinan, meliputi: bertingkah laku sebagai pimpinan, dapat bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik; (5) keorisinilan, meliputi: inovatif

dan kreatif, fleksibel, punya banyak sumber, serba bisa dan mengetahui banyak hal; (6) berorientasi ke masa depan, yaitu dapat memperkirakan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang serta perspektifnya.

6. *Usaha skala kecil dan menengah*, mengenai pengertian skala usaha kecil (*small business scale*), masih terdapat banyak penafsiran. Menurut *Committee for Economic Development*, ciri-ciri bisnis kecil meliputi: (1) manajemennya dilakukan secara bebas, biasanya pemilik langsung menjadi manajer; (2) modal berasal dari pemilik atau kelompoknya; (3) daerah operasinya bersifat lokal, dan si pemilik bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi bisnis; (4) dalam hal usaha industri ukuran besar dan kecil itu sangat relatif, suatu bisnis disebut kecil jika dibandingkan dengan bisnis yang sejenis (Buchori Alma, 1998).

Batasan pengusaha kecil menurut UU No. 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil yaitu “kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Kriteria tersebut adalah: (a) kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan; (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar; (c) milik WNI; (d) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah (UM) atau usaha besar (UB); (e) berbentuk usaha perseorangan, berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sepintas tentang prospek perusahaan kecil menurut B.N. Marbun, (1987) sampai tahun 2020 nanti eksistensi dan masa depan perusahaan kecil di Indonesia masih baik, terbuka, dan potensial. Walau demikian, bukan berarti tidak akan terjadi pergeseran dan perubahan posisi dan keadaan sesuai dengan kondisi kota dan desa serta perubahan atau pergeseran selera dan tingkat pendapatan masyarakat. Dapat diperkirakan terutama di kota-kota besar, pertumbuhan perusahaan atau toko swalayan akan terus bertambah.

7. ***P3T (Program Penanggulangan Penganggur Terampil)*** adalah program Depnaker yang dalam jangka pendek ditujukan untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi pada tahun 1998/1999, dalam jangka panjang ditujukan untuk menumbuhkan lapangan kerja baru yang dirintis oleh para khalayak sasaran P3T. Istilah program penanggulangan pengangguran tenaga kerja terampil melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan ini populer pernah juga disebut sebagai P4T (*Proyek Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil*). Di wilayah Jawa Barat lebih populer dengan sebutan "P3T". Proyek tersebut diluncurkan bersamaan dengan Proyek penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK). Landasan kebijakan proyek ini, sebagaimana tertuang dalam Bahan Sosialisasi "Program Penanggulangan Pengangguran melalui Penciptaan Lapangan Kerja/Usaha Produktif "Padat Karya", terbitan Departemen Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, di antaranya adalah: (1) Surat Menko Ekuin/kepala Bappenas kepada Presiden RI Nomor: 1556/MK/031998,

tanggal 27 Maret 1998 perihal Pengalihan Penanggungjawab Program Pembangunan; (2) DIP Penanggulanagn pengangguran pekerja terampil T.A. 1998/1999.

Sasaran dari program ini yaitu tersedianya lapangan kerja produktif dan berkelanjutan bagi 65.000 orang penganggur pekerja terampil, yang terkena PHK, kehilangan pekerjaan karena kelesuan usaha dan penganggur terdidik lainnya yang tersebar di 18 provinsi. Di tingkat pusat dialokasikan 3.760 paket proyek (20 orang/paket), jumlah tenaga kerja yang dicover meliputi 61.240 orang khalayak sasaran tersebar di 18 propinsi. Biaya yang tersedia untuk memenuhi sasaran dan target proyek tersebut sebesar Rp. 399.185.165.000,- (Ringkasan Proyek P3T, TA., 1998/'99, Depnaker).

Manfaat yang diharapkan dari program ini adalah: (1) dapat mengatasi pengangguran serta mempercepat pertumbuhan ekonomi; (2) memberi pengalaman kepada penyelenggara program baik unsur pemerintah maupun unsur nonpemerintah untuk bekerja sama secara sinergis dan terkoordinasi dalam mengupayakan terwujudnya sasaran program; (2) meningkatkan kapasitas para penyelenggara program dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, gilirannya dapat membuka lapangan kerja dan lapangan usaha.

Propinsi yang melaksanakan program ini diantaranya adalah Jawa Barat. Program P3T di Jawa Barat, sebagaimana dikemukakan Kepala Bidang Bina Program Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Jawa Barat, Endo Undrosjah, bahwa penyelenggaraan P3T Jabar bekerja sama dengan 77 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam lembaga swasta dan koperasi

lainnya, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Pinbuk (Pusat Inkubasi Usaha Kecil), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Ikopin, Klinik Konsultasi Bisnis (KKB), dan lain-lain. Khalayak sasaran yang ditargetkan meliputi 20.000 orang penganggur terampil. Mereka akan dibina melalui program tersebut. Tujuannya untuk membentuk mereka menjadi wirausahawan baru (WUB) dan konsultan di Lembaga Ekonomi Produktif (LEP). Untuk kepentingan itu tersedia anggaran tahun 1998/1999 sebesar Rp. 118 miliar.

8. **P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)**, suatu program pembangunan yang berkaitan dengan kondisi negara Indonesia yang mengalami krisis moneter dan ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Proyek ini suatu program lanjutan dalam penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) atau program yang lain seperti Program Pembangunan Kecamatan (PPK) yang sasarannya di pedesaan. Program ini sebagaimana dijelaskan dalam "Penjelasan Umum", adalah program yang menganut pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). (P2KP, Nopember 1999:1).

G. Metode Penelitian

Studi ini diselenggarakan dengan memadukan dua pendekatan yaitu pendekatan penelitian kualitatif, dan penelitian kuantitatif, Walaupun begitu dalam pelaksanaannya akan lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif, dalam makna pendekatan studi kasus dan pengembangan. Metode yang digunakan dalam

kualitatif metode deskriptif analitik dan studi kasus, sedangkan dalam kuantitatif menggunakan metode eksperimen.

Pendekatan penelitian pengembangan karena bertujuan menghasilkan atau mengembangkan model alternatif pelatihan kewirausahaan. Pengembangan model itu dilakukan melalui langkah deskripsi, interpretasi, evaluasi, komparasi, refleksi, dan rekonstruksi dengan mengambil model pelatihan pada P3T dan model pelatihan pada program P2KP di Jawa Barat sebagai kasus yang diteliti. Deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan refleksi dilakukan terhadap kasus tersebut, kemudian dikaji sesuai dengan teori-teori tentang pelatihan, kewirausahaan, dan selanjutnya dilakukan rekonstruksi dan perumusan ulang sehingga menjadi model baru yang bersifat sebagai model alternatif yang lebih baik dan lebih efisien dari model-model yang sudah ada.

Mengutamakan pendekatan penelitian kualitatif karena segenap paradigma, prosedur, penggalan data/pengukuran, pengolahan, dan analisis data dikerjakan dengan bertolak dari kaidah-kaidah penelitian naturalistik dengan sangat memperhatikan perspektif *etic-emic*, terkait dengan latar kontekstual, dan data-datanya digali dan dianalisis secara mendalam. Adapun penggunaan pendekatan kuantitatif hanya pada pengolahan prates dan pasca-tes dalam uji coba pelatihan di kelas.

Penelitian mengambil lokasi di wilayah Jawa Barat. Seiring dengan kaidah penelitian kualitatif, sampel atau lebih tepatnya adalah subjek-subjek penelitian, diambil secara purposif menurut tujuan dan pertimbangan-

pertimbangan tertentu, sumber data atau informan diambil dengan teknik *snowball* atau dengan *teknik funnel* (cerobong).

Dengan demikian secara umum masalah-masalah penelitian yang ingin dicari jawabannya adalah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

Pertama, bagaimanakah anatomi normatif atau desain program P3T, bagaimana pelaksanaannya, adakah kesenjangan di antara desain program dengan implementasinya, bagaimana tingkat keberhasilan program P3T itu, apa dan dimanakah *kelebihan desain program* dan pelaksanaan P3T. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap juga dilacak dan ditindaklanjuti belajar dan berusaha yang dilakukan oleh alumni program P3T. Jawaban atas pertanyaan penelitian ini diperoleh dengan cara menyelenggarakan studi dokumentasi terhadap dokumen P3T, wawancara kepada para pengelola program dan alumni pelatihan P3T, serta studi kasus pada unit usaha yang dikembangkan alumni pelatihan P3T yang dinilai telah berhasil menerapkan hasil pelatihan kewirausahaan. Kepada para wirausahawan alumni P3T, ditanyakan pendapat mereka tentang kelebihan dan kekurangannya.

Data-data yang didapat dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan *DIER*, yaitu *deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan refleksi*. Permasalahan-permasalahan ini ditujukan untuk mendapatkan deskripsi tentang anatomi desain program P3T, khususnya dalam konteks pelatihannya, pelaksanaannya, kelebihan-kekurangannya, pendapat dan saran-saran dari berbagai pihak yang terkait terhadap penyempurnaan desain programnya. Hasil-hasil analisis itu akan digunakan untuk merefleksi dan merekonstruksi model

alternatif yang ingin diwujudkan. Dalam tahap ini juga diungkap bagaimanakah deskripsi konseptual model pelatihan bagi masyarakat miskin, melalui pelatihan-pelatihan dalam program P2KP, dalam program inipun fokusnya terhadap pelatihan-pelatihannya.

Kedua, pada bagian ini dilakukan laboratory research, baik kajian pustaka, diskusi dan konsultasi dengan nara sumber mengenai pelatihan dan kewirausahaan, bahkan kepada para praktisi yang pekerjaannya di sekitar pelatihan kewirausahaan. Dalam hal ini, untuk melihat pesertanya dalam merintis dan menumbuhkembangkan wirausaha. Jawaban masalah penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan penulisan kembali (*rewrite*) atas desain model pelatihan P3T dan P2KP yang mengarah pada kemampuan kewirausahaan bagi penganggur dan masyarakat miskin atau dengan mereka yang sudah merintis usaha tetapi belum maju, dengan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan yang dipandang perlu.

Ketiga, menyusun model konseptual awal melalui refleksi dari studi deskriptif pola empirik pelatihan dan hasil laboratory research, lalu “divalidasi” melalui “expert judgment” (para praktisi) dalam seminar terbatas juga dalam “dyad” atau diskusi berdua dengan yang bersangkutan. Bagaimanakah validitas dan kelayakan terapan alternatif model pelatihan kewirausahaan bagi pengangguran dan mereka yang belum berwirausaha dan atau yang sudah merintis usaha tapi belum maju atau mengalami “kebangkrutan”. Artinya pengembangan studi ini berdasarkan pendapat para ahli dan praktisi yang dipandang relevan dengan topik penelitian pelatihan kewirausahaan, dan praktek kewiraswastaan.

Pertanyaan yang diajukan kepada para ahli dan praktisi tersebut adalah yang berhubungan dengan pendapat, kritik dan sarannya terhadap deskripsi model pelatihan yang dikembangkan dalam studi ini; bagaimanakah validitas teoritis atas rumusan model tersebut, serta bagaimanakah kelayakan terapan dan ramalan efektivitasnya. Forumnya melalui teknik seminar, lokakarya, diskusi panel maupun diskusi *dyad* (diskusi berdua antara peneliti dengan seorang ahli/praktisi).

Keempat, penerapan uji coba model. Deskripsi penerapan desain model alternatif ini untuk melakukan “uji empirik”. Dan untuk lebih meyakinkannya, dilaksanakan uji coba model kepada sejumlah peserta sebagai sampel model pelatihan kewirausahaan, dalam hal ini kepada sekelompok peserta calon perintis usaha dan kepada Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengajukan pinjaman modal ke program P2KP. Untuk hal ini merekrut “tenan” (peserta) dari kota dan kabupaten Bogor. Pelatihan ini telah didasarkan pada analisis kebutuhan, sebagaimana dikemukakan oleh Sharon Bartram dan Brenda Gibson (1995:3) bahwa “kebutuhan pelatihan diantaranya memerlukan analisis keterampilan dan pengetahuan agar dapat memilih metode yang tepat. Pekerja pemula memerlukan rencana individu yang menunjukkan urutan (sequence) pelatihan, siapa calon pelatih, dan bagaimana pelatihan dilaksanakan”.

Atas dasar hal tersebut, peneliti mempersiapkan perangkat uji coba pelatihan tersebut baik dari segi kurikulum (kompetensi yang harus dimiliki) peserta calon pengusaha, dan pelatihnya. Mengenai pelatih (pemandu), di satu kelas berjumlah tiga orang instruktur (fasilitator), dan seorang pendukung kelas yang biasa membantu dalam penerapan media pelatihan. Dalam pelatihan tersebut sejumlah

metode pelatihan dengan pendekatan andragogi diterapkan, demikian juga metode dengan “gamesnya”, pemberian tugas dengan didampingi pelatih dalam latihan membuat “rencana usaha”. (kurikulum, session guide, dan “game” terlampir).

Adapun model evaluasi yang diterapkan sesuai dengan model eksperimen “*one group pretest-posttest design*” atau desain *prates-pascates*, dan juga mengacu pada model evaluasi pelatihan yang dikembangkan David B., (2001:5), “*Evaluating Training The Road to Measuring Return-On-Investment (ROI)*”. Dalam hal ini dilakukan prates pada awal pelatihan, lalu dilakukan pelatihan atau teratmen materi kewirausahaan termasuk latihan penyusunan usulan usaha (proposal), dinilai motivasi, kemauan, dan kemampuan intelektual kewirausahaan dan rencana usaha/aksi, hal ini untuk memenuhi evaluasi level-1, yaitu “*reaction and planed action*”. Kemudian dilakukan pascates untuk kemampuan belajar konsep dan penyerapannya, hal ini untuk evaluasi level-2 yaitu “*cognitive learning and retention*”. Selanjutnya dilakukan penilaian pengamatan mengenai penerapan rencana aksi untuk memenuhi evaluasi level-3 yaitu “*On The Job Aplication*”. Bahkan untuk beberapa wirausahawan dilakukan evaluasi level-4 yaitu pengamatan hasil usaha/penampilannya atau “*Performance Result*”. Namun, peneliti belum sampai kepada evaluasi level-5 yaitu “*Return On Investment(ROI)*”. Hal ini belum bisa dilakukan mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas, sementara evaluasi level-5 ini memerlukan tenggang waktu yang agak lama, yaitu sekitar 6 bulan sejak “*performance Result*”. Mudah-mudahan evaluasi terakhir ini dapat dilakukan oleh peneliti lain.